



Falsafah *Pobinci-Binciki Kuli* Sebagai dasar Kerukunan Umat Beragama Pada Masyarakat Buton

Local Wisdom and Religious Harmony: A Study of Pobinci-Binciki Kuli Philosophical Values

Mutawally

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton Selatan

Jln. Gajah Mada, Kel. Laompo, Kec. Batauga, Kab. Buton Selatan

Email: mutawallyd@gmail.com

Info Artikel	<i>Abstract</i>
<p>Diterima 01 September 2023</p>	<p>Sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia mencatat telah terjadi beberapa konflik antara penganut agama dan suku, seperti konflik di Ambon Maluku antara Islam dan Kristen pada tahun 1999, konflik suku di Sampit Kalimantan Tengah antara Dayak dan Madura pada tahun 2001. Mengambil sikap terhadap konflik-konflik seperti di atas, bukanlah sekadar melakukan penyelesaian setelah terjadi, tetapi hal penting adalah melakukan pencegahan dengan melibatkan kearifan-kearifan lokal yang dalam masyarakat terutama yang terakait dengan nilai-nilai kerukunan hidup beragama. Penelitian ini akan mengkaji <i>pobinci-binciku kuli</i> yang merupakan kearifan masyarakat Buton yang sejak dahulu telah menjadi sumber tatanan kehidupan di masyarakat dalam menciptakan kerukunan sosial. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan material kajian <i>pobinci-binciki kuli</i>. Pengumpulan data ini melibatkan beberapa informan yang dipilih melalui <i>purposive sampling</i> dimana data dihasilkan melalui teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumen. Kajian dilakukan berfokus pada pengungkapan konsep falsafah orang Buton dalam teks <i>pobinci-binciki kuli</i>, kemudian melihat kontribusinya dalam menciptakan kerukunan hidup bagi umat beragama.</p>
<p>Revisi I 10 September 2023</p>	<p>Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa falsafah <i>pobinci-binciki kuli</i> adalah nilai luhur yang menjadi alat perekat masyarakat Buton yang bersatu dalam kondisi mereka yang berbeda dan menjadi dasar konstitusi kesultanan Buton. <i>Pobinci-binciki kuli</i> mengandung empat falsafah (<i>pataanguna</i>) yaitu: (1) <i>pomae-maeka</i> (saling menakuti), (2) <i>pomaa-maasiaka</i> (saling menyanyangi), (3) <i>popia-piara</i> (saling memelihara), (4) <i>poangka-angkataka</i> (saling menghormati dan menghargai). Keempat falsafah tersebut mengandung pesan kerukunan hidup dalam masyarakat Buton. Hasil kajian ini memiliki kontribusi yang signifikan dalam</p>
<p>Revisi II 05 Oktober 2023</p>	<p>Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa falsafah <i>pobinci-binciki kuli</i> adalah nilai luhur yang menjadi alat perekat masyarakat Buton yang bersatu dalam kondisi mereka yang berbeda dan menjadi dasar konstitusi kesultanan Buton. <i>Pobinci-binciki kuli</i> mengandung empat falsafah (<i>pataanguna</i>) yaitu: (1) <i>pomae-maeka</i> (saling menakuti), (2) <i>pomaa-maasiaka</i> (saling menyanyangi), (3) <i>popia-piara</i> (saling memelihara), (4) <i>poangka-angkataka</i> (saling menghormati dan menghargai). Keempat falsafah tersebut mengandung pesan kerukunan hidup dalam masyarakat Buton. Hasil kajian ini memiliki kontribusi yang signifikan dalam</p>
<p>Disetujui 19 November 2023</p>	<p>Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa falsafah <i>pobinci-binciki kuli</i> adalah nilai luhur yang menjadi alat perekat masyarakat Buton yang bersatu dalam kondisi mereka yang berbeda dan menjadi dasar konstitusi kesultanan Buton. <i>Pobinci-binciki kuli</i> mengandung empat falsafah (<i>pataanguna</i>) yaitu: (1) <i>pomae-maeka</i> (saling menakuti), (2) <i>pomaa-maasiaka</i> (saling menyanyangi), (3) <i>popia-piara</i> (saling memelihara), (4) <i>poangka-angkataka</i> (saling menghormati dan menghargai). Keempat falsafah tersebut mengandung pesan kerukunan hidup dalam masyarakat Buton. Hasil kajian ini memiliki kontribusi yang signifikan dalam</p>

menciptakan model kerukunan hidup umat beragama yang rukun, damai, dan harmonis dalam konteks keindonesiaan.

Kata Kunci: falsafah, kearifan lokal, kerukunan umat beragama, *pobinci-binciki kuli*, buton

Abstract

The long history of the Indonesian nation records that there have been several conflicts between religious and tribal adherents, such as the conflict in Ambon, Maluku between Muslims and Christians in 1999 and the tribal conflict in Sampit, Central Kalimantan, between Dayak and Madurese in 2001. Taking a stand on conflicts such as those mentioned above is not just about resolving them after they happen; the important thing is to prevent them by involving local wisdom in society, especially those related to the values of religious harmony. This research will examine pobinci-binciku kuli which is the wisdom of the Butonese people, which has long been a source of order in society in creating social harmony. The research used a descriptive-qualitative method with pobinci-binciki kuli study material. This data collection involved several informants selected through purposive sampling, where data was generated through interview data collection techniques and document studies. The study was carried out focusing on expressing the philosophical concepts of the Butonese people in the pobinci-binciki kuli texts, then looking at their contribution to creating harmony in life for religious communities. The results of this research explain that the pobinci-binciki kuli philosophy is a noble value that is a tool that holds the Butonese people together in their different conditions and is the basis of the constitution of the Buton sultanate. Pobinci-binciki kuli contains four philosophies (pataanguna), namely: (1) pomae-maeka (scare each other), (2) poma-maasiaka (love each other), (3) popia-piara (care for each other), and (4) poangka- angkataka (mutual respect and appreciation). These four philosophies contain a message of harmony in Butonese society. The results of this study have made a significant contribution to creating a harmonious, peaceful, and harmonious model of religious life in the Indonesian context.

Keywords: *philosophy, local wisdom, religious harmony, pobinci-binciki kuli, buton*

PENDAHULUAN

Kemajemukan merupakan anugerah, tetapi pada sisi lain rentan memancing lahirnya konflik antar kelompok, agama, dan suku. Kemajemukan, selain membawa berkah, juga juga membawa petaka. Akan tetapi, kedua hal itu lagi-lagi kembali pada bagaimana bangsa Indonesia mengelola kemajemukan

sosial dan kultural tersebut (Syarif, 2015).

Mengelola kemajemukan memang diakui bukanlah perkara yang mudah (Kamal, 2013). Konflik sosial berbasis agama menjadi salah satu faktor yang seringkali memicu perselisihan antar kelompok dalam masyarakat hingga menjadi benturan sosial yang meluas.

Tidak terkecuali faktor agama, sangat rentan pula memicu terjadinya konflik horizontal. Itulah sebabnya perlunya menguatkan kerukunan antar umat beragama menjadi hajat nasional yang sangat penting dilakukan demi menjaga keutuhan dan kerukunan hubungan sosial masyarakat yang heterogen.

KH. Muhammad Dachlan, mantan Menteri Agama RI, mengemukakan bahwa kerukunan antar umat beragama merupakan syarat mutlak bagi terciptanya stabilitas politik dan ekonomi (Muhdina, 2015). Hal senada diungkapkan pula Edi Suradjat, kerukunan umat beragama merupakan syarat agar Negara Kesatuan Republik Indonesia agar tetap stabil dan pembangunan nasional dapat berjalan dengan lancar (Basrie, 1994).

Kerukunan umat beragama yang dimaksudkan adalah hubungan sesama umat beragama yang didasari oleh sikap toleransi, saling pengertian dan menghormati, menghargai kesetaraan berdasarkan keyakinan agama masing-masing. Hal yang sama perlu pula mengedepankan sikap saling bekerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Abu Tholhah, 1980).

Konsep kerukunan hidup antara umat beragama terdiri atas tiga kerukunan, yang dalam terminologi Pemerintah menyebutnya sebagai “Trilogi Kerukunan” (Muhdina, 2015). Konsep trilogi kerukunan tersebut merupakan dimensi yang digunakan untuk mengukur kerukunan hidup beragama di masyarakat. Adapun dimensi-dimensi kerukunan itu

mencakup: pertama, dimensi kerukunan antar umat seagama; kedua, dimensi kerukunan antar umat beragama; dan ketiga, dimensi kerukunan umat beragama dengan pemerintah (Jusman Iskandar, 2005).

Membangun kerukunan umat beragama dapat dilakukan melalui pendekatan struktural dan kultural. Namun, pendekatan kultural dinilai sebagai pendekatan yang lebih efektif untuk menguatkan kerukunan di antara kelompok masyarakat, termasuk halnya kerukunan antar umat beragama (Sabara, 2015). Sebagai contoh, penyelesaian konflik antara Islam-Kristen di Maluku dilakukan menggunakan pendekatan kebudayaan “*pela dan gandong*” yang intinya sebuah resolusi konflik dengan mempersaudarakan dua kubu yang berselisih sebagai kakak dan adik (Hamzah Tualeka Zn, 2011). Keberhasilan penyelesaian konflik menggunakan kebudayaan Maluku “*pela dan gandong*” merupakan bukti bahwa kearifan lokal dapat memberi kontribusi positif dalam menciptakan kedamaian dan kerukunan antar umat beragama.

Indonesia memiliki khasanah kearifan lokal yang dapat dijadikan sebagai alat untuk merekatkan hubungan antarumat beragama. Kearifan lokal mengandung nilai penting, di antaranya sebagai acuan dalam bertingkah laku dan berinteraksi dengan orang lain yang berbeda secara budaya maupun agama. Kearifan lokal cukup efektif dalam menciptakan suasana lingkungan sosial yang rukun dan harmonis. Misalnya *dalihan na tulo* di Sumatera Utara, *siro yo ingsun, ingsun yo siro* di Jawa Timur, *sipakalebbe* dan *sipakatauu* di Sulawesi Selatan, konsep *menyama braya* dari

Bali dan konsep *rumah betang* dari Kalimantan Tengah (Sabara, 2015).

Secara substansial, kearifan lokal adalah nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, nilai-nilai tersebut diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam kehidupan sehari-hari (Sabara, 2015). Selanjutnya, kearifan lokal berwujud kata-kata bijak berupa nasihat, pepatah, pantun, dan syair. Kearifan lokal menyediakan aspek kohesif berupa elemen perekat lintas kelompok, agama, dan kepercayaan. Dalam konteks ini, kearifan lokal dapat diartikan sebagai ruang maupun arena dialogis untuk melunturkan segala jenis eksklusivitas identitas politik kelompok (Sabara, 2015).

Pada akhirnya, kearifan lokal dapat dikatakan sebagai komponen penting dalam menciptakan kerukunan umat beragama, sehingga dengan memberdayakan kearifan lokal dapat terwujud tata kehidupan umat beragama yang harmonis dan rukun.

Adapun kearifan lokal Buton yang dimaksud dalam tulisan ini adalah falsafah "*pobinci-binciki kuli*" yang telah difungsikan sebagai alat perekat kerukunan antar umat beragama di tanah Buton. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan membahas bagaimana konsep nilai-nilai falsafah *pobinci-binciki kuli* dan kontribusinya dalam membangun dan menguatkan kerukunan umat beragama di tanah Buton.

Kajian Pustaka

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian dengan judul *Internalisasi Nilai Kearifan Lokal Pobinci-Binciki Kuli pada Usahawan*

Buton dalam Etika Bisnis Syariah untuk Mewujudkan Kesejahteraan (Tamsir, Abdullah, dan Hasaruddin, 2020). Dalam penelitian ini mengungkap bahwa falsafah budaya Buton *pobinci-binciki kuli* selaras dengan empat sifat dasar Rasulullah saw, yaitu *pomaemaeka* terinternalisasi dalam sifat *siddiq*, nilai *poma-maasiaka* terinternalisasi dalam sifat *fatolah*, nilai *popia-piara* terinternalisasi dalam sifat amanah dan nilai *poangka-ngkataka* terinternalisasi dalam sifat *tabigh*. Oleh karena itu pengamalan falsafah *pobinci-binciki kuli* ini dapat mengantarkan usahawan Buton kepada kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Kajian ini selain memiliki kesamaan dengan yang penulis lakukan yakni kesamaan pada penggunaan isu kebudayaan yang diangkat (*pobinci-binciki kuli*), juga memiliki perbedaan pada *output* yang dihasilkan. Adapun *output* pada kajian sebelumnya adalah falsafah *pobinci-binciki-kuli* berkontribusi pada kesuksesan hidup usahawan Buton, sedangkan pada penulisan ini falsafah *pobinci-binciki kuli* berkontribusi pada terciptanya kerukunan umat beragama.

Penelitian dengan judul *Nilai-Nilai Kerukunan dalam Tradisi Lokal (Studi Interaksi Kelompok Umat Beragama di Ambarawa, Jawa Tengah)* (Sulaiman, 2014). Dalam penelitian ini mengungkap bahwa tradisi lokal memegang peranan penting dalam menciptakan kerukunan masyarakat di Ambarawa, Jawa Tengah. Adapun tradisi lokal yang dimaksud adalah kegiatan lebaran bersama, budaya *sonjo*, tradisi *cheng beng*, dan *somah* multi agama. Kajian ini selain memiliki kesamaan dengan yang penulis lakukan, juga memiliki perbedaan. Adapun kesamaannya menghadirkan kerukunan hidup umat menggunakan kebudayaan

lokal. Sedangkan perbedaannya terdapat pada jenis kebudayaan lokal yang digunakan untuk menghadirkan kerukunan hidup umat beragama. penulis mengangkat falsafah *pobinci-binciki kuli* bagi perwujudan kerukunan umat beragama, sedangkan kajian sebelumnya mengangkat jenis-jenis kebudayaan lokal yang ada di Ambarawa Jawa Tengah.

Penelitian dengan judul *Internalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Masyarakat Muna yang Berfungsi Sebagai Upaya Pencegahan Intoleransi* (Artanto and Novira, 2023). Dalam penelitian ini mengungkap bahwa nilai-nilai kearifan lokal yang terdapat pada daerah Muna Barat yakni: 1) *poangka-angka tau*; 2) *popia-piara*; 3) *pomasi-masigho* memiliki muatan persatuan dan kerukunan, di mana jika nilai-nilai kearifan ini diterapkan maka akan melepaskan masyarakat Muna Barat dari jeratan sikap intoleransi. Kajian terdahulu ini memiliki kesamaan dengan kajian yang penulis lakukan yakni kesamaan dalam membangun kehidupan toleran dengan menggunakan kearifan lokal setempat. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis kearifan lokal yang digunakan. Pada penelitian sebelumnya menggunakan kebudayaan lokal Muna, sedangkan penelitian ini menggunakan kebudayaan lokal Buton.

Penelitian dengan judul *Kontribusi Falsafah Pobinci-binciki Kuli Masyarakat Islam Buton Bagi Dakwah Islam Untuk Membangun Karakter Generasi Muda Indonesia* (Mahruddin, 2014). Dalam penelitian ini mengungkap bahwa falsafah *pobinci-binciki kuli* dapat memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam kehidupan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda masyarakat

Buton. Hal ini karena falsafah ini mengajarkan pentingnya nilai-nilai moral dalam bermasyarakat, yaitu *pomae-maeka*, *popia-piara*, *pomaa-maasiaka*, dan *poangka-angkataka*. Kajian terdahulu ini selain memiliki kesamaan dengan kajian yang penulis lakukan, juga memiliki perbedaan. Adapun kesamaannya pada penggunaan isu kebudayaan yang diangkat (*pobinci-binciki kuli*), juga memiliki perbedaan pada *ouput* yang dihasilkan. Adapun *output* yang dihasilkan pada kajian sebelumnya adalah falsafah *pobinci-binciki kuli* memiliki kontribusi dalam membangun karakter generasi muda Indonesia, sedangkan pada kajian yang penulis lakukan memiliki kontribusi dalam menghadirkan kerukunan umat beragama.

Penelitian dengan judul *Kearifan Lokal Masyarakat dalam Membangun Kerukunan Umat Beragama di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur* (Parera and Marzuki 2020). Dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa falsafah budaya yang terdapat di daerah Kupang yakni 1) *Nusi* (gotong royong), 2) *Butukila* (ikat dan pegang rasa persaudaraan), 3) *Suki Toka Apa* (saling mendukung dan menolong), 4) *Muki Nena* (rasa saling memiliki dan mempunyai). Kajian terdahulu ini selain memiliki kesamaan dengan yang penulis lakukan juga memiliki perbedaan. Adapun persamaannya terletak pada penggunaan pendekatan kultural sebagai alat membangun kerukunan umat beragama. sedangkan perbedaannya terletak pada jenis kebudayaan lokal yang digunakan. Penelitian ini menggunakan kebudayaan lokal Buton, *pobinci-binciki kuli*, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan kebudayaan lokal Kupang, Nusa Tenggara Timur.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut W. Creswell penelitian kualitatif merupakan kegiatan mengeksplorasi dan memahami makna dari sejumlah individu atau kelompok orang yang dianggap memiliki kapasitas dari gejala atau permasalahan sosial yang akan diteliti (Jhon W. Creswell, 2014). Penggunaan metode penelitian deskriptif kualitatif ini didasarkan pada alasan bahwa permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini berkaitan dengan kearifan lokal masyarakat Buton, sehingga membutuhkan sejumlah data lapangan yang akurat dan aktual. Dengan demikian, penelitian ini akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif tentang falsafah kearifan lokal *pobinci- binciki kuli* dan kontribusinya terhadap terciptanya kerukunan umat beragama.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi dokumen yang sesuai dengan fokus penelitian. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (*deep interview*) terhadap informan, yaitu para tokoh yang dianggap memiliki peran sentral dalam masyarakat Buton, di antaranya ketua dan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), budayawan buton, dan tokoh masyarakat buton. Selain itu penelitian ini juga menggunakan sumber data sekunder, seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen-dokumen terkait kebudayaan Buton.

PEMBAHASAN

1. Sekilas Tentang Pulau Buton

Buton adalah sebuah pulau yang terletak di sebelah tenggara pulau Sulawesi. Di pulau ini berdiri suatu peradaban manusia, yang sejak dulu membentuk sebuah kerajaan dan selanjutnya menjelma menjadi sebuah kesultanan yang dalam sejarah dikenal dengan nama kesultanan Buton. Buton sebagai daerah kepulauan memiliki sejumlah adat istiadat, suku, tradisi, dan budaya yang sangat beragam, dan hingga saat ini terus berkembang dan dilestarikan di masyarakat.

Keberagaman kearifan lokal tersebut menunjukkan bahwa Buton adalah daerah dengan struktur masyarakatnya yang majemuk, dan realitas kemajemukannya relevan dengan ungkapan dalam bahasa wolio bahwa, *wolio siy olipuna mia mopokawa-kawa*, artinya: “Wolio atau Buton adalah negeri tempat berhimpunnya para pendatang”. Tahara mengungkapkan bahwa meskipun struktur masyarakat Buton mejemuk, akan tetapi masyarakatnya dapat hidup berdampingan dengan rukun dan harmonis (Tahara, 2013).

Gambaran masyarakat Buton yang majemuk sebagaimana di sebutkan di atas, membutuhkan suatu perekat sebagai alat yang memersatukan. Menurut La Ode Zainu, sejak terbentuknya kerajaan Buton di bawah kepemimpinan Raja Waka-ka, dasar pemerintahan diikat oleh “*Poromu Yinda Saangu, Poga Yinda Kolota*” artinya bersatu tetapi tidak berpadu, bercerai tetapi tidak berantara. Dalam pemahaman Zainu, adalah Bhineka Tunggal Ika (La Ode Zainu, 1985).

L.A Muchir menyatakan, dalam konteks peradaban Buton bertemu dengan Islam, dikenal pula nilai luhur

yang dikenal dengan *pobinci-binciki kuli*. Nilai luhur ini menjadi alat pemersatu masyarakat Buton (La Muchir, 2003).

Masyarakat Buton yang terdiri dari berbagai latar belakang profesi, seperti nelayan, petani, peternak, pelaut, dan lain sebagainya memegang teguh falsafah kearifan lokal *pobinci-binciki kuli* untuk menghadapi tantangan kehidupan. Masyarakat meyakini bahwa falsafah kearifan lokal tersebut tidak hanya dapat mengantarkan mereka pada kesuksesan hidup, tapi juga menciptakan persaudaraan, dan keharmonisan hidup.

2. Nilai-Nilai Falsafah *Pobinci-Binciki Kuli*

Jika ditelisik lebih dalam, sesungguhnya semua daerah di tanah air memiliki kearifan lokal (*local wisdom*), yang dalam disiplin ilmu antropologi dikenal dengan istilah *local genius*. Haryati Soebadio (Azizah, 2017) mengatakan bahwa *local genius* adalah *cultural identity*, identitas atau kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri. Watak tersebut yang dijadikan pegangan oleh masyarakat dalam mengarungi samudera, dan menghadapi ombak dan badai kehidupan.

Tanah Buton sendiri memiliki sejumlah kearifan lokal yang hingga saat ini terpelihara dengan baik. Wujud terpeliharanya kearifan lokal tersebut dapat dilihat dari intensitas dan konsistensi masyarakat Buton dalam melaksanakan kegiatan adat dan pengamalan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Di antara bentuk kearifan lokal yang hingga saat ini masih dilestarikan dan dipegang teguh masyarakat Buton adalah berupa

kearifan lokal non fisik. Adapun kearifan lokal tersebut adalah falsafah kearifan lokal *pobinci-binciki kuli* yang artinya “masing-masing orang saling mencubit kulitnya sendiri-sendiri”. Maksudnya, jangan mencubit kulit orang lain, kalau mencubit kulit sendiri terasa sakit (Tahara, 2008).

Pobinci-binciki kuli merupakan istilah lokal di tanah Buton, dan istilah lokal tersebut telah menjadi basis nilai-nilai moral masyarakat setempat dalam membangun hubungan sosial kemasyarakatan. *Pobinci-binciki kuli* dianggap sebagai warisan yang bersifat sakral, nilai-nilai dan ungkapan-ungkapan yang terkandung di dalamnya merupakan suatu hal yang berharga. Secara khusus dan tertulis nilai tersebut diformulasi dalam konstitusi kesultanan Buton yang disebut dengan martabat tujuh, hal ini dilakukan oleh Sultan Buton yang ke-empat Dayanu Ihsanuddin.

Pobinci-binciki kuli juga biasa dikenal dengan *sara pataanguna* yang merupakan hukum adat masyarakat Buton yang berkontribusi memberikan inspirasi kepada masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sesama manusia secara rukun dan harmonis (Athar Hasimi Hasimin, 2012). *Sara pataanguna* dalam bahasa lokal Buton berarti hukum yang empat atau adat yang empat, adat yang empat inilah yang dimaksud dengan nilai yang terkandung dalam *pobinci-binciki kuli* yaitu *pomae-maeka* (saling menakuti), *pomaa-maasiaka* (saling menyayangi), *popia-piara* (saling memelihara), dan *poangka-ngaktaka* (saling menghargai). Dengan prinsip hidup ini, masyarakat Buton terdorong untuk hidup membantu orang, peduli terhadap sesama, dan toleran terhadap keberagaman (Sahlan 2012).

a. *Nilai Pomae-Maeka* (Saling Menakuti)

Pomae-maeka mengandung nilai luhur bahwa setiap orang harus senantiasa saling memuliakan dan saling takut. Saling takut bermakna pengakuan bahwa setiap orang memiliki hak-hak asasi yang sama, harga diri, kehormatan, perasaan, harta benda, keluarga dan lain-lain yang wajib dipelihara, dipertahankan dan dilindungi bersama, sehingga benar-benar dirasakan aman dan damai. Untuk itu setiap anggota masyarakat wajib merasa takut untuk berbuat sesuatu yang berakibat merugikan orang lain. Setiap orang wajib merasa takut melanggar hak-hak asasi, perasaan, kehormatan dan benda pihak lain. Rasa takut demikianlah yang berlaku secara timbal balik antara seluruh anggota masyarakat (Mahrudin 2014). *Pomae-maeka* juga berarti saling mengerti di mana letak kedudukannya, mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah sehingga tercipta rasa saling menghormati satu sama lain.

b. *Nilai Pomaa-Maasiaka* (Saling Menyayangi)

Pomaa-maasiaka mengandung nilai luhur bahwa anggota masyarakat harus senantiasa hidup saling peduli, saling menyayangi, dan saling mengasihi antara tua dan muda, antara sikaya dan simiskin, si kuat dan silemah, pemerintah dan rakyatnya, dan sebagainya (Mahrudin, 2014). Sikap ini dilakukan tanpa memandang apapun status dan keadaan sosialnya, apapun agamanya, kaya atau miskin, tua ataupun muda. Semua dilakukan semata-mata karena bentuk kasih sayang. Dengan demikian, terealisasinya nilai ini maka rasa kekeluargaan, kebersamaan, dan gotong royong dapat berjalan di masyarakat.

c. *Nilai Popia-Piara* (Saling Memelihara)

Popia-piara mengandung nilai luhur agar anggota masyarakat senantiasa memelihara kedamaian, ketentraman antara sesama anggota masyarakat. Falsafah ini menegaskan bahwa anggota masyarakat berkewajiban saling memelihara, saling membina, melindungi, mengamankan material, moril, dan kedudukan di dalam masyarakat sehingga tercipta kesejahteraan bersama. Bilamana falsafah ini dilanggar maka akan terjadi sifat-sifat sebaliknya yaitu saling jatuh-menjatuhkan, hancur-menghancurkan dalam masyarakat, yang akan membawa kepada kerusakan dalam masyarakat (Mahrudin, 2014).

d. *Nilai Poangka-Angkataka* (saling menghormati/ mengangkat derajat)

Poangka-angkataka mengandung nilai luhur agar anggota masyarakat senantiasa hidup bermanfaat dengan saling mengangkat derajat antara sesama anggota masyarakat, terlebih anggota masyarakat yang sudah memberikan darma baktinya kepada masyarakat dan bangsa, wajib diberikan penghargaan yang setimpal, yang dapat mengangkat derajat dan martabatnya dimata masyarakat (Mahrudin, 2014). Falsafah ini juga bermakna saling mendukung, dan saling menopang, tidak saling iri hati dan dengki apalagi menjatuhkan harkat dan martabat orang lain dengan cara yang tidak senonoh.

3. **Falsafah Pobinci-Binciki Kuli dan Kerukunan Umat Beragama**

Tipologi kearifan lokal yang terdapat dalam masyarakat nusantara bisa berupa: norma, nilai, kepercayaan, dan aturan-aturan khusus. Tipologi atau bentuk yang bermacam-macam ini menyebabkan fungsi kearifan lokal menjadi bermacam-macam di antaranya

berperan sebagai petuah dan kepercayaan yang senantiasa dipegang teguh (Aulia and Dharmawan, 2010). Pada table di bawah ini dijelaskan mengenai komponen kearifan lokal beserta peranannya, di antaranya adalah komponen filosofi kearifan lokal yang memiliki peranan sebagai petuah dan kepercayaan di tengah-tengah masyarakat.

No	Komponen	Peranan
1	Sumber daya alam/lingkungan	Kearifan lokal berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumberdaya alam atau lingkungan
2	Sumber daya manusia	Kearifan lokal berfungsi untuk mengembangkan sumber daya manusia
3	Ilmu pengetahuan	Kearifan lokal berfungsi sebagai pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan
4	Filosofi	Kearifan lokal Berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan

Sumber: Sirtha 2003

Kearifan lokal dalam konteks di atas menjelaskan bahwa setiap lokalitas pasti memiliki sistem kepercayaan yang kuat dan melahirkan keyakinan yang teguh sebagai modul dan panutan dalam bersikap dan berperilaku. Kepercayaan yang ada di dalam setiap daerah merupakan turun temurun adanya di antara masyarakat sehingga keberadaan keyakinan di dalam suku tersebut dapat dipertahankan dari generasi ke generasi (Harahap, 2021).

Kedudukan falsafah *pobinci-binciki kuli* sebagai suatu sistem kepercayaan pada hakikatnya memiliki peran signifikan dalam kehidupan masyarakat Buton. Falsafah kearifan

lokal ini mengajarkan agar manusia satu sama lain saling takut melanggar hak asasi orang lain, saling menyayangi, saling memelihara, dan saling menghargai. Falsafah yang menjadi dasar konstitusi kesultanan Buton ini telah lama dianut oleh masyarakat Buton sejak kerajaan butuni pertama, dan menjadi nilai luhur yang dijadikan sebagai alat perekat, sehingga mampu bersatu dalam kondisi yang berbeda .

Falsafah *pobinci-binciki kuli* juga merupakan kompas kehidupan yang senantiasa berfungsi memberi arah masyarakat Buton dalam bertingkah laku dan memilah-milah antara kebaikan dan keburukan dalam menentukan perilaku kesehariannya. Lebih dari itu tak kalah pentingnya, nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah *sarapatanguna* ini mengajarkan makna kehidupan tentang pentingnya menjaga keharmonisan, kedamaian, dan kerukunan di antara kelompok masyarakat. Hal ini juga yang menjadikan masyarakat Buton sangat ramah, aman, dan terbuka menerima perbedaan.

Falsafah *pobinci-binciki kuli* yang dijabarkan dalam *sarapatanguna* merupakan prinsip hidup masyarakat Buton, dan telah memberikan kontribusi positif dalam menciptakan kerukunan umat beragama di tanah Buton. Hal ini sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan Nurawalia, seorang tokoh budaya Buton bahwa falsafah *pobinci-binciki kuli* telah mengajarkan keharmonisan, kedamaian, dan kerukunan dalam kehidupan orang Buton.

“Secara garis besarnya, masyarakat Buton mempraktekkan falsafah kebudayaan ini dalam kehidupan, meskipun seiring perkembangan zaman falsafah ini mulai tergerus

secara perlahan dan mulai ditinggalkan anak-anak mudanya. Namun bukan berarti ditinggalkan secara keseluruhan, tidak. Praktek dan pengamalan nilai-nilai falsafah pobhinci-bhinciki kuli terus berjalan dan terus disosialisasikan kepada masyarakat luas, bahkan saat ini pemerintah di salah satu daerah yang ada di Tanah Buton, tepatnya Kota Baubau sedang massif-masifnya mengampanyekan falsafah ini, Alhasil, setelah masifnya kampanye falsafah ini maka dampak yang ditimbulkan mulai terasa, kasus dan perselisihan mulai berkurang, kota semakin aman, jauh dari kekerasan.” (Wwc. Nurawalia, 15/02/2023)

Sebagai gambaran hasil implementasi nilai-nilai *pobinci-binciki kuli*, penulis mengambil contoh gambaran kehidupan masyarakat di salah satu daerah yang ada di Pulau Buton tepatnya di Kota Baubau. Gambaran ini penulis dapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketua FKUB Kota Baubau, H. Rusdin. Beliau mengatakan bahwa:

“Masyarakat Kota Baubau sejauh ini hidup dengan rukun dan harmonis. Tingkat toleransi antar umat beragama di Kota Baubau juga terbilang cukup tinggi, hal itu dibuktikan sejak berdirinya Kota Baubau sebagai daerah otonom belum pernah terjadi konflik antar umat beragama. Dari sisi peribadatan, masing-masing pemeluk agama dapat melaksanakan ibadah agamanya dengan baik dan mendapat jaminan penuh dari pemerintah maupun masyarakat sekitar. Semua pemeluk agama yang diakui negara diberi kebebasan mengekspresikan

kayakinannya tanpa perlu khawatir mendapat ancaman, teror, maupun gangguan-gangguan lainnya selama pelaksanaannya tidak melanggar peraturan-peraturan yang berlaku”. (Wwc. Rusdin, 10/2/2023)

Data terkait kondisi kerukunan umat bergama di Kota Baubau juga diperkuat oleh survei yang dilakukan oleh Setara Institue tentang indeks kota toleran tahun 2015, menyebutkan bahwa Kota Baubau masuk dalam kategori kota toleran di Indonesia dengan total nilai 42 dan skor 2,21. Kota Baubau bertengker di posisi 40 Besar, jauh mengungguli kota-kota besar di Indonesia, seperti Surabaya, Malang, Jambi, Yogyakarta, Palembang, Aceh, DKI Jakarta dan kota-kota besar lainnya.

Wahyuddin mengungkapkan bahwa kerukunan beragama ditandai dengan adanya sikap saling menghormati satu sama lainnya misalnya dalam hal menjalankan ibadah, dan antar pemeluk agama yang satu dengan lainnya tidak saling mengganggu. (Wahyuddin, 2009). Inti terpenting untuk mewujudkan kerukunan menurut Durkheim adalah penghapusan deskriminasi terhadap golongan atau keyakinan tertentu dan memberi pengakuan dan penghormatan terhadap pluralisme (Mushadi, 2007).

Gambaran kehidupan yang rukun dan harmonis di Kota Baubau tidak lepas dari pemahaman dan penghayatan nilai-nilai luhur *pobinci-binciki kuli*. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Muchir bahwa penghayatan terhadap *pobinci-binciki kuli* telah menjadi sifat manusia Buton yaitu tidak pernah mau memulai, tetapi jika sudah dimulai orang, maka dia tidak akan mundur. orang Buton pantang menyerah dan

tidak pernah mendendam sebab jika mendendam lebih baik mati sekaligus (La Muchir, 2003).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa terciptanya kerukunan hidup umat beragama pada masyarakat Buton tidak lepas dari peran dan kontribusi falsafah *pobinci-binciki kuli* yang sejak lama telah dianut dan dijiwai masyarakat Buton sebagai alat perekat persatuan. Olehnya, agar falsafah *pobinci-binciki kuli* yang mendukung terciptanya kerukunan lebih meluas, diperlukan usaha-usaha dari seluruh lapisan, baik pemerintah maupun masyarakat khususnya masyarakat Buton agar senantiasa menanamkan nilai-nilai kebudayaan ini dalam diri dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan begitu dapat terwujud kerukunan hidup umat beragama yang berkesinambungan.

KESIMPULAN

Sebagai eks pusat kerajaan Buton, masyarakat Buton diwarisi sejumlah kearifan lokal, baik yang berwujud abstrak maupun konkrit. Salah satu kearifan lokal peninggalan kerajaan Buton tersebut adalah falsafah budaya *pobinci-binciki kuli* yang mengandung empat pemahaman yang dalam bahasa adatnya disebut *sara pataanguna*, yaitu, *pomae-maeka* (saling menakuti), *pomaa-maasiaka* (saling menyayangi), *popia-piara* (saling memelihara), dan *poangka-angkataka* (saling menghormati dan menghargai).

Falsafah budaya yang berbasis kearifan lokal ini mengandung doktrin kerukunan yang mendorong masyarakat tanah Buton hidup damai dan harmonis, serta telah memberi sumbangsih positif bagi pembangunan kerukunan umat beragama di tanah

Buton. Sejauh ini, kehidupan dan hubungan umat beragama di tanah Buton terbilang cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan kondisi masyarakat Buton yang meskipun heterogen, tetapi dengan falsafah *pobinci-binciki kuli* yang sarat dengan nilai luhur tersebut mampu menjadikan masyarakat Buton hidup berdampingan dengan umat beragama yang lain.

Rekomendasi

Falsafah budaya *pobinci-binciki kuli* ini adalah warisan kesejarahan yang perlu dijaga dan dibudayakan mengingat doktrin yang terkandung di dalamnya sarat nilai-nilai yang mengusung kerukunan. Oleh karena itu perhatian dan keterlibatan semua pihak, khususnya pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk menjaga kearifan lokal, tidak hanya menjaga namun juga mengembangkan, memanfaatkan, dan mengawasinya sesuai dengan kearifan lokal yang ada di daerah. Hal ini dilakukan guna memperkokoh jati diri bangsa, martabat dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penelitian ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton Selatan, Kepala Sekis Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kab. Buton Selatan, Ketua dan segenap pengurus Forum Komunikasi Umat Beragama Kota Baubau dan Kab. Buton Selatan,

tokoh budaya, dan para informan yang telah memberi informasi dan data pendukung bagi kesempurnaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Tholhah. (1980). *Kerukunan Antar Umat Beragama*. Semarang: IAIN Walisong.
- Artanto, Muhammad Fattah Dwi, and Ade Novira. (2023). "Internalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Masyarakat Muna Yang Berfungsi Sebagai Upaya Pencegahan Intoleransi." *Pusaka: Jurnal Khazanah Keagamaan* 11(1): 1–13.
- Athar Hasimi Hasimin. (2012). *Tinjauan Konstitusional Martabat Tujuh Kerajaan/Kesultanan Buton*. Baubau: Respect.
- Aulia, TOS, and AH Dharmawan. (2010). 04 Sodaliti *Local Wisdom of Water Resource Management in Kampung Kuta*. <http://repository.ipb.ac.id:8080/handle/123456789/60143>.
- Azizah, Siti Nur. (2017). "Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal Pandanus Handicraft Dalam Menghadapi Pasar Modern Perspektif Ekonomi Syariah (Study Case Di Pandanus Nusa Sambisari Yogyakarta)." *APLIKASIA: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama* 17(2): 63–78. ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/aplikasia%0APengembangan.
- Basrie. (1994). *Pemantapan Pembangunan Melalui Pendekatan Ketahanan Nasional*. Jakarta: PPS UI dan Ditjen Renungan Dephankam.
- Hamzah Tualeka Zn. (2011). "Kearifan Lokal Pela-Gandong Di Lumbung Konflik." (117).
- Harahap, Sahrul Sori Alom. (2021). "Sakral Dan Profan (Sistem Kepercayaan Sakral Dan Profan Suku Akit Di Bantan Tengah)." *Akademika: Jurnal Keagamaan dan Pendidikan* 17(1): 102–12.
- Jhon W. Creswell. (2014). *Research Design Kualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage: Uversity Of Nebraska Lincoln.
- Jusman Iskandar. (2005). *Dinamika Kelompok, Organisasi Dan Komunikasi Sosial*. Bandung: Puspaga.
- Kamal, Muhiddinur. (2013). "Pendidikan Multikultural Bagi Masyarakat Indonesia Yang Majemuk." *Al-Ta lim Journal* 20(3): 451–58.
- Mahrudin. (2014). 15 *Jurnal Dakwah Kontribusi Falsafah Pobinci-Binciki Kuli Masyarakat Islam Buton Bagi Dakwah Islam Untuk Membangun Karakter Generasi Muda Indonesia*. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/jurnaldakwah/article/view/310>.
- LA Muchir. (2003). *Tasawwuf Akhlaqi Sara Patanguna Memanusiakan Manusia Menjadi Manusia Khlifatullah Di Bumi Kesulthanan Butuni*. Baubau: Tarafu-Butuni.
- Muhdina, Darwis. (2015). 3 *Jurnal Diskursus Islam KERUKUNAN UMAT BERAGAMA BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI KOTA MAKASSAR*.
- Mushadi. (2007). *Mediasi Dan Resolusi*

- Konflik Di Indonesia: Dari Konflik Agama Hingga Mediasi Peradilan.* Semarang: Wali Songo Media Center.
- La Ode Zainu. (1985). *Buton Dalam Sejarah Kebudayaan.* Surabaya: Suradipa Surabaya.
- Parera, Moh. Mul Akbar Eta, and Marzuki Marzuki. (2020). “Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Membangun Kerukunan Umat Beragama di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT).” *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 22(1): 38.
- Sabara. (2015). 21 *Al-Qalam Merawat Kerukunan Dengan Kearifan Lokal Di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara.* <http://jurnalalqalam.or.id/index.php/Alqalam/article/viewFile/239/22>.
- Sahlan. (2012). “Kearifan Lokal Pada Kabanti Masyarakat Buton Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Karakter.” *el harakah* 14 No. 2.
- Sulaiman, Sulaiman. (2014). “Nilai-Nilai Kerukunan Dalam Tradisi Lokal (Studi Interaksi Kelompok Umat Beragama Di Ambarawa, Jawa Tengah).” *Jurnal Harmoni* 13(1): 65–79.
- Syarif, Nurrohman. (2015). 18 *Asy-Syari’ah ISLAM DAN KEMAJEMUKAN DI INDONESIA (Upaya Menjadikan Nilai-Nilai Yang Menjunjung Tinggi Kemajemukan Dalam Islam Sebagai Kekuatan Positif Bagi Perkembangan Demokrasi).*
- Tahara, Tasrifin. (2013). “Reproduksi Stereotip Dan Resistensi Orang Katobengke Dalam Struktur Masyarakat Buton.” *Antropologi Indonesia* 33(2): 183–207.
- Tamsir, Tamsir, Muhammad Wahyuddin Abdullah, and Hasaruddin Hasaruddin. (2020). “Internalisasi Nilai Kearifan Lokal Pobinci-Binciki Kuli Pada Usahawan Buton Dalam Etika Bisnis Syariah Untuk Mewujudkan Kesejahteraan.” *Al-Tijary* 5(1): 1–18.
- Tasrifin Tahara. (2008). *Menyibak Kabut Di Keraton Buton.* Baubau: Respect.
- Wahyuddin, dkk. (2009). *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi.* Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.